

Bentuk Perlawanan terhadap Pembungkaman Kebebasan Berekspresi pada Akun Instagram @gejayanmemanggil

B. Arnold Simangunsong, Shenna

Universitas Pelita Harapan
Jl. Jend. Sudirman No. 50 Jakarta 12930
Email: benedictus.simangunsong@uph.edu

DOI: 10.24002/jik.v21i2.7620

Submitted: July 2023

Reviewed: July 2024

Accepted: November 2024

Abstract: *The removal of the mural as a critical message in the Instagram account prompted a critical community @gejayanmemanggil to hold a Lomba Mural Dibungkam. The purpose of this article is to provide a vital explanation of the form of resistance that causes the act of silencing freedom of opinion as well as the disclosure of motives in constructing a message about resistance. The method uses Van Dijk's critical discourse model with text, social cognition, and context dimensions. The results found that the form of resistance was carried out directly, indirectly, and virtually through social media and made the message viral.*

Keywords: *constructing a message, critical community @gejayanmemanggil, form of resistance, the removal of mural, Van Dijk critical discourse model*

Abstrak: *Penghapusan mural sebagai penyampai pesan bernada kritik mendorong komunitas kritis @gejayanmemanggil di Instagram untuk mengadakan Lomba Mural Dibungkam. Tujuan dari artikel ini adalah memberikan penjelasan kritis tentang bentuk perlawanan karena tindakan pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebebasan berpendapat serta pengungkapan motif dari komunitas di Instagram dalam proses konstruksi pesan tentang perlawanan. Metode yang dilakukan adalah model wacana kritis Van Dijk melalui dimensi yakni teks, kognisi sosial, dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlawanan dilakukan secara langsung, tidak secara langsung yakni dengan terselubung, dan virtual melalui penggunaan media sosial dengan menjadikan pesan itu viral.*

Kata Kunci: *bentuk perlawanan, komunitas kritis @gejayanmemanggil, konstruksi pesan, model wacana kritis van dijk, penghapusan mural*

Tahun 2021, saat Covid-19 melanda Indonesia, masyarakat dihadapkan pada persoalan trust issue (ketidakpercayaan) terhadap vaksin untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Ketidakpercayaan terhadap vaksin didorong oleh kekhawatiran akan munculnya berbagai varian virus baru, peningkatan jumlah pasien positif Covid-19, dan angka kematian. Pemerintah menerapkan berbagai peraturan untuk

menanggulangi kasus ini, seperti Work From Home (WFH) dan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Di sisi lain, muncul kekhawatiran lain terkait dengan efek domino Covid-19, yakni mulai muncul gejala terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan tingginya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti disampaikan oleh Kementerian

Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI) (Barenbang Kemenaker, 2024), sejumlah 9,12 juta orang terdampak pandemi dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran. Pada saat bersamaan, terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok yang mendorong terjadinya disparitas yang sangat tinggi. Firdaus (2021, p. 108) menyampaikan bahwa harga bawang merah mengalami fluktuasi antara Rp 20.000,- hingga Rp 40.000,- akibat dampak Covid-19, sedangkan harga tahun 2020 antara Rp 30.000,- hingga Rp 60.000,-. Pemerintah berusaha mengatasi kondisi tersebut dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti perlindungan sosial (*social safety net*) dan insentif dunia usaha.

Di tengah kondisi tersebut, muncul peristiwa penghapusan mural oleh aparat. Hal ini mengakumulasi keresahan dalam masyarakat karena mempersepsikan tindakan tersebut merupakan tindakan yang mencederai kebebasan berekspresi. Beberapa respons yang muncul untuk menjawab keresahan tersebut adalah tema-tema mural di media sosial, seperti *Tuhan*

Aku Lapar, Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit, Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan, 404: Not Found. Mural-mural ini adalah mural yang mencoba menjawab sekaligus melakukan kritik terhadap tindakan penghapusan mural oleh aparat. Di sisi lain, muralis menjadi individu yang dituduh telah menghina lambang negara, khususnya pada mural *404: Not Found*.

Viralnya tuduhan terhadap muralis pada mural *404: Not Found* bukan karena nilai estetikanya, melainkan tindakan reaktif aparat menghapus gambar mural tersebut dengan cat hitam. Tindakan penghapusan tersebut menuai banyak kontroversi dan menjadi *trending topic* di *X* melalui tagar *#Jokowi404NotFound*. Tagar tersebut menunjukkan sebuah akumulasi keresahan akibat dari tindakan reaktif aparat terhadap ide kebebasan berekspresi masyarakat yang dibungkam. Mural tersebut terlihat seperti pada Gambar 1.

Berdasarkan penelusuran bisa dikatakan bahwa istilah *404: Not Found*, seperti dikatakan oleh Dewaweb Team (2024) adalah kode status *Hypertext*



Gambar 1 Mural Jokowi *Not Found*
Sumber: Sudrajat (2021)

Transfer Protocol yang menandakan bahwa server tidak dapat ditemukan. Server di dalam sistem operasi komputer adalah sebuah pusat atau otak dari sistem operasi dan ketika tidak ditemukan bisa dinyatakan sebagai sebuah sistem yang mati. Pemahaman akan istilah inilah yang kemudian menjadi makna pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintah tentang keberadaannya.

Sebagai sebuah pemaknaan, mural tidak bisa berdiri sendiri tanpa kehadiran sejumlah makna lainnya. Menurut Yohana (2021, p. 62) pesan mural yang menggunakan tema-tema terkait isu sosial dan politik akan menjadi sebuah kritik sosial. John Powers (dalam Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017) mengatakan bahwa pada hakikatnya seorang muralis adalah seorang komunikator yang memiliki proses mental, karakteristik kepribadian, sifat unik, serta memiliki perbedaan pandangan dalam memengaruhi pembuatan, presentasi, dan penerimaan pesan. Setiap muralis, untuk bisa mengekspresikan dirinya dengan baik, digambarkan sebagai manusia yang memiliki kebebasan untuk berekspresi, termasuk kebebasan berbicara di depan umum, atau mengeluarkan kritik demi kesejahteraan hidupnya. Opini atau ide dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk dan sarana, termasuk berkomentar melalui media sosial maupun seni mural.

Menurut *Council of Europe* (2022, p. 25) syarat mutlak dari sebuah negara demokratis yakni terlaksananya kebebasan berekspresi oleh setiap individu baik itu dilakukan melalui media sosial maupun

offline, salah satunya melalui penciptaan mural. Puddephatt (2011) menyatakan bahwa para pemilik dan distributor konten, yakni para jurnalis, editor, dan pemerintah, harus berperan sebagai seorang *gatekeeper* bagi semua orang dalam mengakses informasi. Apalagi dengan kehadiran internet, maka individu bisa memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga bisa menjadi *creator*, *co-creator*, kurator, dan editor. Hal ini menciptakan potensi hubungan komunikasi lateral antarindividu, daripada hanya mengandalkan hubungan yang hierarkis secara eksklusif.

Sementara itu, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menjelaskan mengenai jaminan kemerdekaan untuk mengeluarkan pikiran. Kemajuan teknologi dan informasi, seperti dikatakan White (2014, p. 18), mendorong kebebasan berekspresi lebih luas sehingga tugas media dalam memberikan pengawasan atau *surveillance* bisa memberikan dampak yang lebih besar. Salah satu bentuk kebebasan berekspresi adalah mural di media sosial Instagram.

Penelitian mengenai kebebasan berekspresi melalui mural sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian mengenai mural sebagai sarana kebebasan berekspresi digambarkan sebagai medium kritik mengenai kondisi sosial (Yendra, Septia, & Dwinitia, 2021), penyampai pesan sosial bagi masyarakat (Yohana, 2021), penyampai pesan nilai luhur (Laksana & Adiwibawa, 2018),

dan medium yang memiliki unsur politik dalam kehidupan sosial (Iswandi, 2016). Lima penelitian memiliki pemikiran yang sama dalam menyoroti penggunaan mural sebagai sebuah kebebasan berekspresi, yakni merekam kondisi kehidupan sosial masyarakat. Ketika mural merekam isu sosial, maka gambarannya akan memperlihatkan sebuah sikap yang dinamis pemaknaannya.

Pada penelitian sebelumnya, mural lebih menggambarkan kehidupan sosial masyarakat, namun pada artikel ini mural bukan hanya menggambarkan kehidupan sosial masyarakat, tetapi sebagai alat perlawanan untuk mengajak orang lain menyuarakan pesan yang sama. Mural sebagai sebuah ajakan merupakan praktik berisikan pesan-pesan, seperti perjuangan dan seruan untuk mendukung kemerdekaan (Pramana & Irfansyah, 2019). Namun, makna perjuangan yang dahulu adalah menghadapi penjajahan, maka makna perjuangan yang tergambarkan pada seni mural adalah sebuah ajakan untuk melawan kebebasan berekspresi yang terkekang.

Mural sebagai medium perlawanan terhadap upaya pembungkaman kebebasan berekspresi makin menemukan tempat ketika disampaikan melalui media sosial. Melalui sifat media sosial yang cepat dan tak terbatas, sebuah pesan mampu mendorong terjadinya perubahan sosial (Taprial & Kanwar, 2012, p. 12). Menurut Kaplan dan Haenlein (dalam Carr & Hayes, 2015), media sosial memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Konten dalam Instagram bukan hanya

menggunakan kalimat, tetapi juga gambar dengan estetika visual yang menarik. Kedua elemen ini, menurut Manovich (2002), merupakan elemen utama yang membuat khalayak mudah mengerti dan memahami pesan-pesan kritik yang akan disampaikan. Pernyataan tersebut membuat peneliti berasumsi bahwa ada kaitan antara viralnya sebuah pesan dengan medium penyampai pesan yang tepat.

Viralnya sebuah pesan di Instagram bisa terjadi bila pesan tersebut berkaitan dengan pembungkaman dalam bentuk penghapusan. Hal ini terjadi karena penghapusan adalah: 1) bentuk pembungkaman terhadap kritik, 2) tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan harus dilawan. Sebagai bentuk perlawanan, Mamahit dan Pratiwi (2022, p. 192) mengatakan bahwa media sosial bisa digunakan sebagai sebuah ruang demokrasi dalam penyampaian suara rakyat yang tidak terakomodasi oleh media konvensional. Media sosial bisa dikatakan sebagai media alternatif dalam penyampaian pesan, khususnya pesan tentang perlawanan terhadap kebebasan berekspresi. Dalam menggambarkan perlawanan, pesan yang diproduksi akan dipengaruhi oleh ideologi dan konstruksi pemilik akun media sosial yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, maupun politis.

METODE

Peneliti menggunakan paradigma kritis untuk menjelaskan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang melalui produksi dan reproduksi teks, ketimpangan antara kelompok mayoritas dan minoritas,

dan ketidakadilan yang terjadi pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada penelitian ini, paradigma kritis berusaha untuk melihat adanya hubungan kekuasaan untuk membongkar para muralis yang dipersepsikan melawan pihak penguasa melalui konten yang disampaikan di Instagram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis dari Teun Van Dijk. Menurut Haryatmoko (2021), analisis wacana kritis adalah analisis wacana yang berusaha membongkar ideologi yang tersembunyi di balik bahasa, dalam hal ini teks, dan memberikan solusi atau bahkan ruang demokrasi yang sama. Model Van Dijk digunakan karena model ini memberikan gambaran tentang wacana dalam tiga dimensi, yakni dimensi teks (struktur makro, mikro, dan superstruktur), dimensi kognisi sosial (proses produksi teks), dan dimensi konteks (situasi serta latar belakang budaya dan sejarah yang sudah ada).

Dimensi tekstual digunakan untuk mengetahui makna dari gambar dan teks pada unggahan Instagram akun @gejayanmemanggil selama tahun 2021, tepatnya mulai 14 Agustus 2021 hingga 2 Oktober 2021 melalui tagar #Jokowi404NotFound. Unggahan tersebut akan dianalisis melalui 3 tingkatan teks yakni: 1) struktur makro atau tematik melalui pengamatan pada tema dan subtema berkaitan dengan masalah, 2) struktur superstruktur atau skematik melalui penelusuran teras berita (*lead*) dan situasi yang ada di dalam teks, 3) struktur

mikro yang dibagi dalam tiga kelompok besar yakni: 1) semantik fokus pada unsur latar, detail, maksud, serta praanggapan, 2) sintaksis akan menganalisis bentuk kalimat, koherensi, 3) stilistik akan menganalisis unsur teks berkaitan dengan leksikon dan grafis. Hal ini menjadi langkah awal yang dilakukan untuk menganalisis serta memberikan gambaran mengenai isi pesan dari pernyataan pada akun @gejayanmemanggil.

Pada dimensi kognisi sosial, peneliti melakukan wawancara dengan informan S. Nama dan jabatan informan S dianonimkan karena kesepakatan peneliti dan informan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui motif dan tujuan dari pembuatan lomba mural di Instagram sebagai bentuk perlawanan dalam kebebasan berekspresi pada tanggal 22 September 2022. Pada dimensi konteks, peneliti melakukan penelusuran sumber pustaka untuk memberikan pandangan tentang kondisi sosial kemasyarakatan yang terbentuk.

HASIL

Dimensi Teks

Pada bagian teks, peneliti menganalisis struktur teks dan strategi wacana untuk menegaskan tema perlawanan dalam pembatasan kebebasan berekspresi, dominasi, pertentangan, dan ketimpangan kekuasaan pada isu penghapusan mural. Dimensi teks mencakup tayangan visual, penggunaan teks dan grafis, narasi, dan wawancara narasumber. Analisis teks dibagi menjadi tiga, yakni struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro.

Argumen-argumen yang dibangun melalui pernyataan di akun Instagram @gejayanmemanggil memperlihatkan bahwa ada kondisi nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Pada artikel ini akan ditampilkan tiga dari 26 *postingan* untuk memberikan gambaran mengenai wacana tekstual pada akun @gejayanmemanggil. Unggahan ini untuk memperlihatkan gambaran mengenai suasana pembungkaman tersebut, seperti aksi pembungkaman melalui pelaporan Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemberedelan untuk media tradisional seperti *Tempo*, mural sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan, serta sanksi yang diberikan

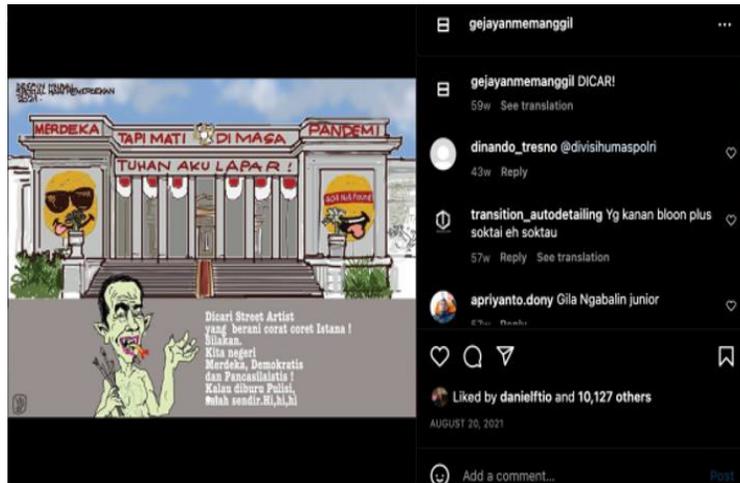
apabila tidak dilakukan penghapusan mural. Bentuk intimidasi ini menjadi pemicu untuk melawan pembungkaman tersebut. Sebanyak 23 *postingan* tersebut bisa digambarkan dalam Tabel 1.

Hasil analisis struktur teks menunjukkan bahwa sebanyak tiga unggahan memperlihatkan gambaran seputar isu pembungkaman mural. Ketiga unggahan tersebut berusaha memperlihatkan kondisi yang terjadi setelah mural dihapus, serta konstruksi wacana kritik dari akun @gejayanmemanggil yang memperlihatkan tindakan pemerintah. Gambar 2 menunjukkan contoh unggahan dari akun @gejayanmemanggil yang menggambarkan suasana pengancaman.

Tabel 1 23 Postingan dari 14 Agustus-2 Oktober 2021 pada Akun Instagram @gejayanmemanggil

No	Nama Postingan	Tanggal
1	Dicari!	20 Agustus 2021
2	Semua balihonya dibalik <i>aja gimana?</i> Ganti Mural	22 Agustus 2021
3	Indonesia memanggil para <i>muralist</i>	23 Agustus 2021
4	<i>Before After</i> #DIBUNGKAM	23 Agustus 2021
5	Yogyakarta, 21 Agustus 2021	23 Agustus 2021
6	Lomba Mural #DIBUNGKAM	24 Agustus 2021
7	Sindir Aparat, Gejayan memanggil gelar lomba mural dibungkam	24 Agustus 2021
8	Lomba mural digelar di Yogyakarta	24 Agustus 2021
9	Mohon maaf, hadiah bisa dengan bentuk lain selain uang	25 Agustus 2021
10	Respons kebebasan berpendapat	26 Agustus 2021
11	Pemerintah Belanda akan Hapus mural ini!	26 Agustus 2021
12	<i>Gak usah diapus pak, ini editan</i>	26 Agustus 2021
13	Melukis di akhir pekan sambil menyeruput teh untuk menyambut rezim Orde Baru kedua	28 Agustus 2021
14	Suka membungkam kritik, kuburan dipenuhi mural	29 Agustus 2021
15	Polisi, politisi pada suka pakai UU ITE	31 Agustus 2021
16	Perjuangan akan terus berlanjut	1 September 2021
17	<i>No Justice, no peace</i>	4 September 2021
18	Dilantik secara agamis, kelakuan <i>satanis</i>	5 September 2021
19	Dibuka CPNS profesi baru	10 September 2021
20	Biarkan Pemerintah berlomba membungkam, <i>tapi</i> kemenangan ini tetap milik kita	15 September 2021
21	Artikel Polisi gelar lomba mural berhadiah Piala Kapolri	16 September 2021
22	Lawan Rezim Polisi Mural!	
23	Mural kawan-kawan di Bandung	2 Oktober 2021

Sumber: Olahan Peneliti (2023)



Gambar 2 Dicari *Street Artist*

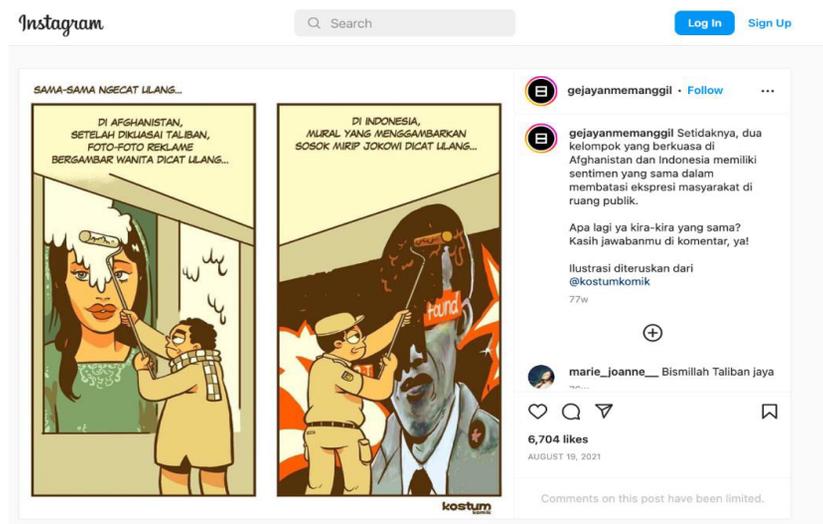
Sumber: Akun Instagram @gejayanmemanggil (15 September 2021)

Makna tekstual dari unggahan di atas memperlihatkan tampilan pesan sindiran yang disampaikan oleh akun @gejayanmemanggil pada pemerintah Indonesia yang justru menjadi ancaman demokrasi itu sendiri. Pernyataan dari teks pada Gambar 2 yang bertuliskan "Dicari *street artist* yang berani corat coret istana! Silakan. Kita negeri Merdeka, Demokratis, dan Pancasilaistis! Kalau diburu Polisi, salah sendiri. *Hi, hi, hi*". Pernyataan yang diakhiri dengan ungkapan simbol *Hi.hi.hi* bisa dimaknai sebagai sebuah

pengejekan atas tindakan yang bisa terjadi pada siapapun yang membuat mural.

Unggahan lain yang memperlihatkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap kebebasan berekspresi juga disampaikan seperti terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 memperlihatkan perbandingan kelompok yang berkuasa, yakni Indonesia dan Afghanistan, dalam membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Teks menggambarkan bahwa sejak Afganistan dikuasai kelompok Taliban, hak-hak kebebasan perempuan



Gambar 3 Sama-sama *Ngecat Ulang*

Sumber: Akun Instagram @gejayanmemanggil (19 Agustus 2021)

dibatasi. Isu pembungkaman hak perempuan di Afganistan bisa tergambarkan dari kutipan berikut, "hampir 400 perempuan Afganistan yang menjadi pegawai PBB kini telah dilarang bekerja oleh Taliban. Padahal, sebelumnya mereka dibebaskan dari larangan tersebut" (PBB Sebut, 2023). Peristiwa di Afganistan ini menjadi pemicu wacana akun @gejayanmemanggil yang ingin menyamakan kekuasaan pemerintah Indonesia dalam mengatur kebebasan berekspresi seperti cara Taliban menguasai Afghanistan.

Pada unggahan lain, akun @gejayanmemanggil menganalogikan perlawanan dengan kasus pemberedelan *Tempo*. Hal ini tampak seperti pada Gambar 4.

Gambar 4 berusaha mengingatkan kepada publik agar kejadian pemberedelan *Tempo* tidak terjadi lagi, serta mengajak pembaca untuk terus bersuara akan ruang kebebasan berekspresi yang baik.

Argumen-argumen yang dibangun melalui unggahan pada akun

@gejayanmemanggil memperlihatkan bahwa ada kondisi nyata terhadap pembungkaman kebebasan berekspresi. Bukan hanya dari tiga unggahan tersebut, tetapi 23 unggahan lainnya juga menggambarkan suasana pembungkaman.

Dimensi Kognisi Sosial

Dimensi kognisi dalam artikel ini dikembangkan berdasarkan pemikiran Van Dijk yang dikutip oleh Eriyanto (2017, h. 260). Asumsi dasar dimensi kognisi sosial beranggapan bahwa teks sebenarnya tidak memiliki makna. Pemaknaan terhadap teks diberikan oleh pemakai bahasa melalui kesadaran mental penggunanya. Melalui penjelasan yang lebih sederhana, dimensi kognisi sosial merupakan upaya mengenai motif penulisan teks yang dipengaruhi oleh nilai dan referensi serta pengalaman hidup. Penjelasan atas motif-motif tersebut digambarkan oleh penulis melalui wawancara yang dilakukan kepada informan.

Proses produksi teks disusun berdasarkan konteks situasi yang muncul



Gambar 4 Katakan dengan Mural

Sumber: Akun Instagram @gejayanmemanggil (30 Agustus 2021)

pada saat itu, khususnya konteks situasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas penghapusan mural. Teks yang diunggah berupa sindiran kepada pemerintah dalam bentuk ilustrasi kartun dan opini budayawan terhadap kasus pembungkaman mural serta semangat perlawanan. Salah satu contoh opini tersebut dapat dilihat melalui pernyataan berikut:

Akhirnya gara-gara “*Jokowi:404 Not Found*”, “Jokowi tiga periode” dihapus, muralnya jadi berubah, jadi sikap politik terhadap pandemi, dari tiga periode. Itu *kan* karena respons dari polisi dan TNI, itu yang dianggap sebagai stabilitas. Sebenarnya, apa yang mereka lakukan itu tidak menstabilkan, justru malah memperkeruh keadaan. *Tapi* yang jelas bahwa polisi yang banyak membungkam media itu sudah berkali-kali membuat saya lebih kecewa, dengan adanya aksi damai yang saya buat atau oleh yang kawan-kawan buat, kok saya di-*intel*, nomor saya diretas berkali-kali, saya dituduh ini itu. (S, wawancara, 22 September 2022)

Pandangan lain memusatkan perhatian pada persoalan sensitivitas dan keresahan praktik pembungkaman. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci diperoleh informasi bahwa pada tahap awal, respons masyarakat cukup positif, meskipun perlombaan yang dilaksanakan tidak menjanjikan hadiah tertentu.

Nah itu, karena ada yang berkomentar “*gak hadiah kok di-follow*” seperti mengejek. Karena situasi pandemi ya orang menjadi lebih peka terhadap orang lain, saling membantu, tetapi *kok* keresahan orang yang mengkritik pandemi, *404 Not Found* itu, malah dihapus. Itu *kan* mengganggu simpati

publik, jadi untuk apa dihapus. (S, wawancara, 22 September 2022)

Dibalik respons positif lomba mural serta keresahan masyarakat terhadap pembungkaman dalam kebebasan berekspresi, aktivitas lomba juga mengalami intimidasi melalui beberapa ancaman, seperti di antaranya penggunaan pasal di UU ITE.

Jadi ketika orang berbicara sesuatu dengan data yang sudah diverifikasi, dianggap *hoax*, dianggap setengah kebenaran. Itu juga dengan adanya UU ITE, orang berbicara dengan kebebasan di media sosial, orang langsung meragukan, sehingga kebebasan berpendapat itu dikonotasikan oleh pemerintah sebagai suatu kebohongan karena *half-truth* itu. Jadi, tidak ada yang divalidasi, seakan akan itu adalah sebuah serangan. (S, wawancara, 22 September 2022)

Meskipun dibayangi ancaman, akun @gejayanmemanggil tetap konsisten menyelenggarakan tahapan-tahapan perlombaan mural. Penyelenggaraan lomba tersebut diharapkan menjadi aktivitas untuk menetralisasi pembungkaman. Meskipun demikian, kegiatan ini membuka memori traumatik informan S, yakni pernah diawasi dan dibuntuti oleh polisi. Pengalaman tersebut membentuk pemahaman tentang motif perlombaan mural seperti yang dinyatakan sebagai berikut:

Ya, terutama itu karena konteks kekecewaan, keresahan. *Tapi* yang jelas bahwa polisi yang banyak membungkam media itu sudah berkali-kali membuat saya lebih kecewa, dengan adanya aksi damai yang saya buat atau oleh yang kawan-

kawan buat, *kok* saya di-*intel*, nomor saya diretas berkali-kali, saya dituduh ini itu, sampai orang Jakarta, karena HP saya diretas jadi disalahgunakan untuk pelecehan menggunakan nomor saya dan banyak hal lain. Saya cukup kecewa, kenapa komunikasi rakyat dalam politik itu kerap tidak didengar, dianggap sebagai pengganggu, sehingga saya dianggap diperlakukan sebagai teroris. (S, informan, 22 September 2022)

Beberapa pandangan di atas memberikan gambaran tentang dimensi kognisi sosial. Dimensi sosial merupakan kesadaran mental penulis teks ketika membentuk teks yang meliputi kepercayaan, pengetahuan, dan prasangka atau bisa dipahami sebagai representasi kognisi dan strategi wartawan dalam memproduksi sebuah berita (Eriyanto, 2017, p. 260). Akun @gejayanmemanggil mengunggah informasi berbentuk sindiran terhadap pemerintah dalam bentuk ilustrasi kartun dan pendapat budayawan dalam kasus pembungkaman mural, UU ITE, dan semangat perlawanan bagi masyarakat Indonesia.

Akun @gejayanmemanggil memosisikan dirinya sebagai akun Aliansi Rakyat Bergerak yang menempatkannya sebagai bagian dari rakyat. Akun @gejayanmemanggil menganggap persoalan pembungkaman mural sebagai hal penting dan meresahkan bagi masyarakat. Melalui pemilihan posisi tersebut, akun @gejayanmemanggil menggarisbawahi jika pembungkaman terus menerus dilakukan, maka akan terbentuk kecemasan dan ketakutan dalam masyarakat. Akun

@gejayanmemanggil mengagregasi pesan-pesan perlawanan dalam bentuk perlombaan mural untuk merespons kegelisahan tersebut.

Motif lain yang mendasari akun @gejayanmemanggil menginisiasi perlombaan mural adalah menyatukan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan hak berpendapat dalam koridor negara demokrasi. Intisari inisiasi ini terutama ditujukan untuk membuka ruang diskusi dan ekspresi lebih luas tanpa ketakutan dan intimidasi dari kekuasaan. Poin penting lain yang menjadi target akun @gejayanmemanggil adalah mengubah cara pandang bahwa kritik terhadap pemerintah bukan hal tabu, serta menghilangkan ketakutan dan perasaan terancam bagi pelaku kritik. Pada titik ini, akun @gejayanmemanggil berupaya membuka ruang-ruang diskusi dan ekspresi untuk mendorong partisipasi publik, berdiskusi, konsolidasi, dan menginisiasi kesamaan kesempatan berpendapat tanpa ancaman dan ketakutan. Beberapa unggahan di media sosial menggambarkan keinginan perbaikan ruang diskusi dan partisipasi publik tersebut. Berikut contoh-contoh unggahan di media sosial: *mimin bantu menyalurkan desain-desain untuk perlombaan versi aparat, glagatnya dah persis rezim Suharto kan ya? Gaskeun buosku, genderang perang masih terdengar kencang di jalan-jalan.*

Dimensi Konteks

Pengamatan dimensi konteks pada artikel ini dilakukan dengan membandingkan perlakuan penanganan kritik antara pemerintah Jokowi dengan Afghanistan. Penulis melihat bahwa respons terhadap kritik dua pemerintah

tersebut memiliki kesamaan. Pemerintah dua negara menggunakan instrumen pembungkaman melalui penghapusan unggahan. Respons tersebut memicu tumbuhnya inisiatif-inisiatif kolaborasi dan partisipasi pada beberapa kelompok sipil di Indonesia. Beberapa refleksi yang melandasi munculnya inisiatif-inisiatif tersebut berkaca dari pemberedelan yang terjadi di majalah *Tempo* dan konstruksi ketakutan melalui ancaman-ancaman formal UU ITE terutama yang berkaitan dengan dugaan penghinaan simbol negara.

Pengamatan melalui pemaknaan teks menunjukkan adanya kecenderungan praktik kekuasaan. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kekuasaan diidentifikasi melalui tindakan aparat dalam penghapusan mural bernada kritik. Tindakan ini dapat dimaknai sebagai aksi pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi masyarakat Indonesia. Pada posisi ini, akun @gejayanmemanggil berperan sebagai akun media sosial yang berpandangan kritis terhadap isu sosial, terutama pembungkaman kebebasan berekspresi, serta sebagai simpul ajakan perlawanan masyarakat Indonesia.

Media sosial menjadi sebuah alat yang memudahkan informasi menjadi viral. Kesadaran ini membangun keyakinan bahwa tersebarnya sebuah pesan perlawanan dengan cepat dan luas mampu mendorong ruang gema yang lebih besar untuk membangkitkan kesadaran masyarakat. Salah satu contohnya ada pada artikel (Kritik Jokowi, 2021) dengan judul, *Mengapa kami tidak boleh protes?* Pada

artikel tersebut terdapat ungkapan yang menunjukkan respons terhadap kondisi riil atas bentuk perlawanan itu sendiri.

PEMBAHASAN

Muralis Jawahir dan Kurniawan pada tahun 2021 melukis sebuah kalimat yang menggelitik untuk memberikan gambaran mengenai pembungkaman kebebasan berekspresi, dalam hal ini mural, yakni dipaksa sehat, di negara yang sakit. Kalimat yang dilukis pada dinding rumah warga di Kecamatan Bangil tersebut sangat tepat untuk menggambarkan kondisi tata kelola negara saat itu. Jawahir dan Kurniawan melihat bahwa negara saat ini menggunakan aparatur negara untuk menekan pihak tertentu agar mengikuti keinginannya. Tekanan tersebut disertai dengan ancaman hukum karena menggambar wajah presiden sebagai kepala negara dengan tidak sopan. Tindakan aparatur negara yang mengancam warga negara mengingatkan kembali masa sebelum reformasi, yakni ketika institusi pers dibungkam melalui pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Di satu sisi, pencabutan izin merupakan langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap perusahaan pers yang tidak sejalan dengan gagasan pemerintah. Di sisi lain, pencabutan SIUPP menunjukkan praktik kondisi otoritarianisme penguasa kepada masyarakatnya.

Di masa Orde Baru, bukan hanya institusi pers yang dibungkam, tetapi juga suara-suara berbeda atau berseberangan dengan pemerintah. Penggunaan sistem tertutup pada saat itu membentuk

sentralisasi kebenaran pendapat. Ketika ada pendapat berbeda, maka pendapat tersebut diposisikan sebagai pandangan atau pernyataan yang menggerus kewibawaan pemerintah. Praktik ini kerap terjadi selama masa Orde Baru bahkan hingga saat ini, setelah 25 tahun reformasi. Fakta ini menunjukkan bahwa pada era sistem demokratis masih terdapat pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.

Hans Giovanni Yosua (dalam Dwiastono, 2023), seorang peneliti di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan pandangannya mengenai pola pembungkaman berekspresi di Indonesia yaitu: 1) represi secara langsung terjadi pada saat unjuk rasa di lapangan; 2) serangan siber berupa peretasan dan stigmatisasi kritikus oleh *buzzer*; 3) penggunaan instrumen hukum untuk memenjarakan ekspresi (kriminalisasi atau *judicial harassment*). Tiga pola ini memperlihatkan bahwa pihak yang berkuasa tidak siap untuk memosisikan kritik sebagai sebuah masukan.

Ketidaksiapan pihak berkuasa menerima kritik sebagai sebuah ekspresi tergambarkan dari Indeks Demokrasi Indonesia 2018-2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021). Indeks tersebut menunjukkan bahwa ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk menghambat kebebasan berpendapat lebih tinggi jika dibandingkan ancaman atau kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah dengan aparaturnya memiliki potensi terbesar

untuk mencederai demokrasi, kebebasan berekspresi, dan menjadi alat represif untuk memaksa masyarakat diam atau pidana.

Kondisi pemerintah melalui praktik menebar ancaman memanfaatkan aparat sejalan dengan pemikiran Althusser (2014, h. 85–86) yang menyebutkan bahwa konsep *repressive state apparatus* merupakan mekanisme represif untuk memastikan dominasi kelas-kelas berkuasa atas kelas pekerja. Pada kasus pembungkaman mural, pemerintah menggunakan polisi sebagai *state apparatus* yang bertindak represif kepada pembuat mural dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Tindakan tersebut pada satu sisi dimaknai berbeda oleh masyarakat. Sebagai warga negara, masyarakat menganggap tindakan tersebut harus dilawan agar demokrasi terus berjalan. Bentuk perlawanan tersebut bukan dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan dengan penyampaian pesan melalui mural. Hal ini dilakukan karena ruang dialog dan persuasi yang seharusnya dilakukan aparat tidak dapat dilakukan karena lebih mengutamakan pendekatan represif.

Perlawanan Terbuka

Perlawanan terbuka merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan secara langsung dan terlihat. Berkaitan dengan perlawanan terbuka ini, terdapat contoh pesan yang disampaikan untuk memberikan gambaran perlawanan masyarakat terhadap tindakan represif dari aparat, seperti, *jalanan adalah jalan, Gaskeunn!* Secara terbuka, makna pesan ini berarti turun ke jalanan adalah sebuah bentuk tindakan tekanan yang

dilakukan untuk membuka ruang dialog. Turun ke jalan merupakan pemberitahuan mengenai eksistensi warga negara yang terbungkam dan pesan kepada aparat bahwa tindakan represif melalui ancaman harus dilawan.

Demokrasi tidak berkembang jika kritik tidak disertai dengan ketersediaan ruang untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kritik sudah seharusnya dirawat, dihargai, dan dimaknai sebagai pesan untuk terus berbenah diri, ketimbang diposisikan sebagai ancaman bagi eksistensi pemerintah itu sendiri (Rozaan & Fransiscus, 2021, h. 1). Pada titik ini, respons negara dalam menyikapi penghapusan mural sangat diperlukan. Namun, jenis respons yang dibutuhkan adalah respons yang berbentuk *servicing*, yaitu membantu warga mengartikulasikan dan memenuhi tujuan bersama mereka, bukan respons berbentuk *steering* (mencoba mengontrol atau mengarahkan masyarakat) (Denhardt & Denhardt, 2015, h. 669).

Perlawanan Terselubung

Prasanti (2023) menyatakan bahwa mural seni jalanan merupakan sebuah fungsi perlawanan terselubung. Pemahaman mengenai perlawanan terselubung adalah sebuah tindakan melawan seseorang, kelompok, maupun organisasi secara tidak langsung/diam-diam. Bentuk perlawanan ini dapat dilakukan melalui penggunaan konten media sosial bernada sindiran yang memiliki makna sama dengan kritik terhadap kondisi realitas sosial.

Sebenarnya bentuk perlawanan seperti ini sudah pernah dilakukan ketika

masa perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui perlawanan verbal dan penyebaran propaganda. Hal ini dilakukan secara diam-diam karena posisi Belanda sebagai pihak berkuasa memiliki potensi melakukan tindakan represif terhadap setiap individu yang mengganggu kekuasaannya. Perlawanan dilakukan dalam bentuk pembuatan mural pada dinding-dinding rumah dengan harapan masyarakat menangkap makna dari isi pesan tentang kemerdekaan dan pembebasan dari penjajahan. Mural dapat dimaknai sebagai budaya tandingan atau *culture jamming*, sebuah budaya yang disampaikan oleh kelompok tertentu, sebagai bentuk keterwakilan dari masyarakat, untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

Melalui pesan terselubung, gambaran ekspresi diri yang terbungkam belum tersampaikan. Perlawanan menjadi jawaban untuk mencari keadilan, yakni keadilan atas pembagian hak dan kewajiban. Mural merupakan ekspresi-ekspresi dari politik dan nilai sejarah dalam membentuk budaya dan pemahaman terkait isu sosial mengenai gerakan dan tindakan sosial (Reed, 2005, h. 107). Mural menjadi medium dan senjata yang efektif untuk menyebarkan ideologi perlawanan.

Perlawanan Secara Virtual

Pilihan penyampaian kritik dialihkan melalui media sosial ketika perlawanan dilakukan melalui ruang riil terhambat. Melalui media sosial, mural tidak bisa dihapus jejak digitalnya, dan keterjangkauan pesannya menjadi lebih luas. Mamahit dan Pratiwi (2022)

menyebutkan bahwa media sosial menjadi *new media* yang mempertahankan ruang demokrasi dan suara rakyat yang tidak terakomodiasi oleh media arus utama.

Slogan *No Viral, No Justice* merupakan slogan yang tepat untuk menggambarkan dualisme penyikapan, yaitu penyikapan penguasaan yang terbentuk di dunia riil dan penyikapan secara egaliter di dunia virtual. Slogan ini menjadikan media digital sebagai medium yang menekan penguasa. Slogan ini pun menjadikan media digital sebagai ruang publik baru untuk melakukan kritik sosial dan ruang aspirasi bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan ketidakadilan (Arianto, 2022, h. 63).

Selain sebagai ruang publik dan aspirasi, media sosial dapat menjadi medium rujukan untuk mendorong perlawanan, dan membentuk solidaritas di antara warga negara yang merasakan pembungkaman tersebut. Media digital saat ini menjadi medium mobilisasi populis pada ruang digital yang memiliki peran strategis sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Peran sebagai kelompok penekan ini tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain, bahkan pemerintah (Al Habsy, 2022).

SIMPULAN

Negara seharusnya menjadi sebuah institusi pengawal demokrasi dan kebebasan berekspresi. Secara faktual, peran negara bergeser saat mengelola kritik yang disampaikan melalui mural. Pemerintah melalui aparturnya menggunakan pendekatan kekuasaan

untuk mempertahankan dominasinya melalui pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintah seakan mengabaikan kritik dari warga negara yang memiliki pengalaman masa lalu, yaitu pembungkaman pada era Orde Baru. Pengalaman masa lalu tentu saja tidak ingin terulang dan perlawanan untuk menciptakan kondisi yang demokratis dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas.

Perlawanan antara lain dilakukan dalam bentuk perlawanan terbuka yang diserukan melalui pernyataan pada akun @gejayanmemanggil. Bentuk perlawanan lainnya dilakukan secara terselubung, yakni dilakukan secara tersembunyi, dan bentuk perlawanan terakhir adalah bentuk virtual yang dilakukan melalui ruang-ruang digital, khususnya media sosial Instagram. Melalui Instagram, akumulasi mobilisasi pendapat tercipta dan membentuk kelompok penekan bagi pemerintah.

Penelitian mendatang bisa mengambil fokus penyelidikan aspek tata kelola penyampaian kritik sosial, khususnya kritik sosial yang diposisikan sebagai tindakan mengancam oleh pemerintahan. Fokus pengamatan dapat dilakukan pada ketepatan pemilihan pendekatan dalam merespons kritik. Pemerintah perlu membuka ruang-ruang dialog untuk membangun iklim yang lebih demokratis baik di ruang riil ataupun ruang digital.

DAFTAR RUJUKAN

@gejayanmemanggil. (2021). Aliansi rakyat bergerak. *Instagram.com* <<https://www.instagram.com/gejayanmemanggil/?hl=en>>

- Al Habsy, M. H. (2022, January 4). Belajar dari fenomena “no viral no justice”. *Detik.com*. <<https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>>
- Althusser, L. (2014). *On the reproduction of capitalism: Ideology and ideological state apparatus* (3rd ed.). London, UK: Verso Publishing.
- Arianto, B. (2022). Melacak gerakan masyarakat sipil melalui tagar #reformasidikorupsi di Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(1), 51–67.
- Badan Pusat Statistik. (2021, August 8). *Indeks demokrasi indonesia (IDI) menurut indikator; 2018-2020*. *Bps.go.id*. <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjM4IzI=/indeks-demokrasi-indonesia--idi--menurut-indikator.html>>
- Bareng Kemenaker. (2024, November 24). *Menaker Ida: 29,12 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Kritik Jokowi. (2021, August 16). Kritik “jokowi 404:not found” berujung penghapusan mural: Mengapa kita tidak boleh protes?”. *Bbc.com*. <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58220409>>
- Carr, C. T., & Hayes, R. A. (2015). Social media: defining, developing, and divining. *Atlantic Journal of Communication*, 23(1), 46–65.
- Council of Europe. (2022). Working with the council of europe: A practical guide for civil society. Strasbourg, Prancis: Council of Europe
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). The new public service revisited. *Journal Public Administration Review*, 75(5), 664–672.
- Dewaweb Team. (2024, April 24). Error 404 not found: pengertian, penyebab, dan cara mengatasinya. *Dewaweb.com*. <<https://www.dewaweb.com/blog/error-404-not-found-apa-maksudnya-dan-cara-mengatasinya/>>
- Dwiastono, R. (2023, May 9). 25 tahun pasca reformasi, kebebasan berpendapat di indonesia belum terjamin. *Voaindonesia.com*. <<https://www.voaindonesia.com/a/tahun-pasca-reformasi-kebebasan-berpendapat-di-indonesia-belum-terjamin/7084186.html>>
- Eriyanto. (2017). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Indonesia, Yogyakarta: LKIS.
- Firdaus, M. (2021). Disparitas harga pangan strategis sebelum dan saat pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(2), 107–120.
- Haryatmoko. (2021). *Critical discourse analysis (analisis wacana kritis): landasan teori, metodologi, dan penerapan*. Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Iswandi, H. (2016). Seni mural sebagai unsur politik dalam kehidupan sosial. *Besaung: Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 1(1), 9–14.
- Laksana, D. A. W., & Adiwibawa, B. A. P. (2018). Mural dalam paparan media dan pembelajaran sosial bagi masyarakat kampung Kota. *Demandia*, 3(1), 46–56.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Long Grove Illinois, US : Waveland Press, Inc.
- Mamahit, J. E., & Pratiwi, A. (2022). Instagram sebagai media alternatif dalam konflik agraria (studi kasus pada akun instagram @forumpancoranbersatu). *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 191–200.
- Manovich, L. (2002). *The language of new media*. Massachusetts, US : MIT Press.
- PBB Sebut. (2023, April 5). PBB sebut staf perempuannya dilarang bekerja oleh Taliban. (2023, April 5). *Dw.com*. <<https://www.dw.com/id/pbb-sebut-staf-perempuannya-dilarang-bekerja-oleh-taliban/a-65231841>>
- Pramana, G. I., & Irfansyah, A. (2019). Street art sebagai komunikasi politik: Seni, protes, dan memori politik. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(2), 98–108.
- Prasanti, R. I. (2023). Perlawanan terselubung di tengah demokrasi (Studi kasus mural jalanan di kota solo dan yogyakarta). *Journal of Politics and Government Studies*, 12(1), 171–180.

- Puddephatt, A. (2011). Mapping digital media: freedom of expression rights in the digital age. *Opensocietyfoundations.org*. <<https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/954441ed-1a7e-4d87-a517-47b61180a7c7/mapping-digital-media-freedom-expression-rights-20110728.pdf>>
- Reed, T. V. (2005). *The art of protest: Culture and activism from the civil rights movement to the Streets of Seattle*. Minneapolis, US : University of Minnesota Press.
- Rozan, F. A., & Fransiscus, J. (2021). *Demokrasi tapi kok dibatasi? Menyoal kritik dibalas represi*. *Gamapi.fisipol.ugm.ac.id*. <<https://gamapi.fisipol.ugm.ac.id/demokrasi-tapi-kok-dibatasi/>>
- Sudrajat, D. (2021, August 21). Seniman grafiti pertanyakan kenapa mural kritikan dihapus aparat. *Bogordaily.net*. <<https://bogordaily.net/2021/08/seniman-grafiti-pertanyakan-kenapa-mural-kritikan-dihapus-aparat/>>
- Taprial, V., & Kanwar, P. (2012). *Understanding Social Media*. India, India : Ventus Publishing Aps.
- White, A. (2014). *Digital media and society: transforming economics, politics, and social practices* (1st ed.). London, UK: Palgrave Mcmillan.
- Yendra, Y., Septia, E., & Dwinitia, S. (2022). The re-existence of murals as a medium of criticism in the modern digital era. *Curricula: Journal of Teaching and Learning*, 7(1), 30–36.
- Yohana, M. F. (2021). Mural sebagai media penyampai pesan sosial bagi masyarakat dalam perspektif semiotika charles sanders pierce. *Jurnal Ilmu Komunikasi: Gandiwa*, 01(02), 2798–5180.